

ABSTRAK

Keterangan dari dokter tertuang secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut *Visum et Repertum*. Sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 186 KUHAP. *Visum et repertum* juga dapat digolongkan sebagai alat bukti surat, karena sesuai fungsi dalam pembuktian yang menyatakan bahwa *visum et repertum* adalah laporan tertulis, yaitu sesuai dengan Pasal 187 KUHAP.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis: (1) aturan perundang-undangan terhadap peranan *visum et repertum* dalam upaya pembuktian tindak pidana penganiayaan, (2) peranan *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam pelaksanaan peradilan perkara penganiayaan di Pengadilan Negeri Blora, (3) hambatan-hambatan dan solusinya yang terjadi dalam pembuktian berupa *visum et repertum* pada kasus tindak pidana penganiayaan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) *Visum et Repertum* dibuat berdasarkan Undang-Undang yaitu Pasal 120, 179 dan 133 KUHAP dan dokter dilindungi dari ancaman membuka rahasia jabatan meskipun *Visum et Repertum* dibuat dan dibuka tanpa izin pasien, asalkan ada permintaan dari penyidik dan digunakan untuk kepentingan peradilan, (2) Peranan *Visum et Repertum* pada kasus penganiayaan dalam putusan perkara nomor 184/Pid.B/2018/PN Bla yang mana hakim menimbang pada unsur dalam Bab XX tentang Penganiayaan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang mana unsur melakukan penganiayaan bahwa akibat tersebut dalam hal ini adalah perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, yang berdasarkan pada alat bukti berupa *Visum et Repertum* pada tubuh korban, (3) Hambatan dalam pembuktian berupa *visum et repertum* pada kasus tindak pidana penganiayaan dan dengan solusi dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut antara lain Kualifikasi luka berdasarkan kebutuhan hukum membingungkan untuk seorang dokter, Standarisasi dari penentuan derajat luka yang akan dituangkan pada *Visum et Repertum*, Ketentuan penandatanganan surat *visum et repertum* oleh dokter, Permintaan *visum et repertum* yang kurang/tidak lengkap Surat Permintaan *Visum* (SPV) datang terlambat.

Kata Kunci: *Visum et Repertum*, Pembuktian, Tindak Pidana Penganiayaan.

ABSTRACT

Information from doctors is written in the form of a letter of the results of a medical examination called *Visum et Repertum*. As stated in the explanation of Article 186 of the Criminal Procedure Code. *Visum et repertum* can also be classified as documentary evidence, because it is in accordance with the function in the proof which states that the post mortem is a written report, which is in accordance with Article 187 of the Criminal Procedure Code.

This research aims to determine, study and analyze: (1) the laws and regulations on the role of *visum et repertum* in the effort to prove criminal acts of mistreatment, (2) the role of *visum et repertum* as evidence in the implementation of torture cases in the Blora District Court, (3) obstacles and solutions that occur in the form of evidence *visum et repertum* in cases of criminal abuse.

The approach method used in this research is sociological juridical. The specifications of this study are analytical descriptive. Data sources used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. Then secondary data is data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of the study it can be concluded: (1) The Criminal Code (KUHP) contains articles that regulate criminal acts that openly and jointly commit violence against people who cause injuries and goods that cause damage to goods. This criminal act is often referred to as the criminal beatings and damages listed in Article 170 of the Criminal Code, (2) The results of research conducted by the author in the Blora District Court concerning case studies regarding Article 170 paragraph 2 1 of the Criminal Code concerning criminal acts with co-workers conducting violence against people who cause injuries (beatings), a form of the criminal justice process from the flow of the trial in the decision Number 94 / Pid.B / 2019 / PN Bla as a form of criminal responsibility for the perpetrators of the beating crimes that are processed in the criminal justice process, (3) In the criminal justice process, law enforcement against criminal beatings has its own obstacles in the stages of its judicial process. The stages in the criminal justice system are in the form of stages of investigation and investigation carried out by the police, stages of prosecution by prosecutors, and stages of justice as decisions made by judges.

Keywords: *Visum et Repertum*, Proof, Criminal Acts of Persecution